

INDEKS PERKEMBANGAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN KABUPATEN LUWU TIMUR

Nursafitra M¹, Rifdan²

Universitas Negeri Makassar, Makassar, Indonesia^{1,2}

E-mail: vitanursafitra@gmail.com

ABSTARAK

Penelitian ini bertujuan mengukur indeks perkembangan pemberdayaan masyarakat pedesaan Kabupaten Luwu Timur terdiri 4 kawasan pengembangan atas 5 ruang lingkup yaitu: Ruang lingkup ekonomi, sosial budaya, lingkungan, jejaring sarana dan prasarana, serta kelembagaan. Pendekatan penelitian yaitu deskriptif kuantitatif dengan teknik Non-Probability Sampling, penentuan sampel secara purposive sampling ialah penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu sebanyak 200 responden melalui analisis data menggunakan Multidimensional Scaling (MDS) dengan software Rappfish Analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kawasan Pengembangan Wisata, memiliki nilai Indeks yaitu 54,56 dengan status mandiri. Kawasan Pengembangan Peternakan dan Pengolahan Non Kayu, memiliki nilai Indeks yaitu 34,41 dengan status konsolidasi. Kawasan pengembangan layanan jasa dan perkotaan, memiliki nilai indeks yaitu 42,75 dengan status konsolidasi. Kawasan pengembangan potensi perkebunan lada, memiliki nilai indeks yaitu 34,54 dengan status konsolidasi.

Kata Kunci: Perkembangan, Pemberdayaan, Masyarakat Desa, PT. Vale

ABSTRACT

This study aims to measure the development index of rural community empowerment in East Luwu Regency, consisting of 4 development areas with 5 dimensions, namely: Economic, socio-cultural, environmental, network of facilities and infrastructure, and institutional dimensions. The research approach is descriptive quantitative with Non-Probability Sampling technique, sample determination by purposive sampling is the determination of samples with certain considerations of 200, respondents with data analysis using Multidimensional Scaling (MDS) using Rappfish Analysis software. The results showed that the Tourism Development Area, had an index value of 54.56 with independent status. The Livestock Development and Non-Timber Processing Area has an index value of 34.41 with a consolidated status. Service development areas and urban areas, have an index value of 42.75 with a consolidated status. The potential development area for pepper plantations has an index value of 34.54 with a consolidated status.

Keywords: Development, Empowerment, Village Community, PT. Vale

PENDAHULUAN

Dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, PT Vale telah berupaya mengembangkan pola dan skema Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM), antara lain programnya adalah Program Pengembangan Kawasan Perdesaan Mandiri (PKPM) di empat Kecamatan di wilayah

pemberdayaan pada Blok Sorowako, pada Kabupaten Luwu Timur, yakni : Kecamatan Malili, Kecamatan Wasuponda, Kecamatan Towuti, dan Kecamatan Nuha, yang terdiri dari 38 Desa/Kelurahan secara keseluruhan.

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan sebuah komitmen suatu perusahaan/dunia bisnis dalam memberikan

manfaat terhadap pengembangan ekonomi yang berkelanjutan, dan menitikberatkan pada perhatian aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan (Pranoto, A. R., & Yusuf, D. 2014).

Bagi perusahaan, CSR berangkat dari nilai moral bukan perintah hukum (Paksaan) dalam kaitan ini pembangunan masyarakat wilayah tambang tidak hanya tanggungjawab pemerintah saja, tetapi setiap warga negara berperan untuk mewujudkan kesejahteraan bersama dan meningkatkan kualitas masyarakat terdampak tambang, pada dasarnya terdapat 3 elemen yang berperan penting dalam pembangunan yaitu pemerintah, masyarakat, dan swasta. Ketiga komponen mesti bersinergi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi secara merata dan sehat serta produktif, dunia tambang tidak dapat berfikir hanya untuk dirinya semata melainkan harus bersifat eksploratif untuk memperhatikan wilayah sekitar secara khusus masyarakat terdampak pada area pertambangan (Suhadi, A Febrian, A. R & Turatmiyah, S. 2014).

Pembangunan yang berkelanjutan diperlukan adanya upaya kontrol dari masyarakat (*check and Balances*), upaya tersebut membutuhkan partisipasi masyarakat terutama dalam hal mengawasi kebijakan pemerintah (misalnya mengawasi penyalahgunaan kewenangan), dan peran partisipasi pihak swasta (perusahaan) dalam mempengaruhi kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah (Disemadi, H. S., & Prananingtyas, P. 2020). Upaya tersebut tidak lain masyarakat yang berkehidupan diseputar area tambang dapat mengelola potensinya secara mandiri. Program pemberdayaan masyarakat melalui dana CSR perusahaan selama ini telah banyak dinikmati oleh masyarakat yang terintegrasi di seputar wilayah tambang PT. Vale.

Dimana sebelumnya, PT Vale menjalankan program pengembangan masyarakat, melalui Program Terpadu Pengembangan Masyarakat (PTPM). Transformasi pola dan skema pengembangan dan pemberdayaan masyarakat berbasis Program PKPM dari PTPM dilakukan sejak 2018, ketika desa-desa bergabung dalam satu wilayah untuk memanfaatkan dan mengembangkan potensi terbaiknya, sehingga pertumbuhan

ekonomi dapat lebih cepat terwujud, dan diharapkan berujung pada kemandirian masyarakat. Lahirnya PKPM sebagai bentuk inovasi melanjutkan program sebelumnya, dan merupakan bentuk program kemitraan antara masyarakat, pemerintah daerah, dan PT Vale sebagai pihak dari swasta (perusahaan). Dalam pelaksanaan program PKPM ini, desa tidak lagi berjalan secara sendiri-sendiri melainkan saling terintegrasi satu sama lain di era kolaborasi dan bergabung dalam satu kawasan.

Perencanaan dan pelaksanaan program atau kegiatan dilakukan dengan bertujuan untuk pengembangan kawasan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan. Dimana, pembangunan kawasan perdesaan yang diartikan sebagai pembangunan terintegrasi antar desa yang dilaksanakan sebagai bentuk upaya pemerintah dalam mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif.

Agar perancangan dan implementasi program/kegiatan di setiap kawasan lebih terarah sesuai dengan lokus, fokus, dan tempo sesuai sasaran rencana, sehingga dapat memudahkan terciptanya sinergisitas antara perusahaan dalam mengalokasikan dana tanggung jawab sosial bersama dengan pihak pemerintah daerah (Pemda), Kementerian, dan lembaga Pemerintah non Kementerian. Maka, untuk itu perlu dilaksanakan pengukuran Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan di 4 kawasan di 4 Kecamatan yakni Kecamatan Nuha, Towuti, Wasuponda dan Malili di wilayah pemberdayaan PT. Vale di Luwu Timur. Hal ini, sejalan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 46/DPKP/SK/04/2018 terkait Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan.

Wilayah pengukuran kawasan berdasarkan program yang diukur dalam klaster pengembangan pemberdayaan masyarakat PT. Vale melalui anggaran CSR yaitu: (1) Kawasan pengembangan

wisata di Kecamatan Nuha dengan program pengembangan ialah potensi wisata, (2) Kawasan Pengembangan Peternakan dan Pengolahan Non Kayu di Kecamatan Wasuponda dan Nuha dengan program pengolahan non kayu, (3) Kawasan Pengembangan Layanan Jasa dan Perkotaan di Kecamatan Malili dengan program layanan jasa perkotaan UMKM, dan (4) Kawasan Pengembangan Potensi Perkebunan Lada di Kecamatan Towuti dengan program pengembangan lada/merica.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Saleh, A., & Basit, L. 2018) penelitian dilakukan oleh (Gumanti, S., Juniah, R., & Taqwa, R. 2016), dan penelitian dilakukan oleh (Puspita, M., & Ibrahim, M. 2021) hasil penelitian mereka mengungkap bahwa pemanfaatan dana CSR dialokasi oleh pihak perusahaan terhadap pengembangan dan pemberdayaan masyarakat diseperti tambang sangat memberi dampak yang sangat besar, dengan adanya dana CSR masyarakat akan lebih percaya diri untuk meningkatkan potensi diri berdasarkan potensi wilayah yang dimiliki baik berupa ekonomi makro menengah (UMKM), sektor pertanian dan perkebunan, maupun sektor jasa. Dana CSR sangat membantu kemandirian masyarakat dan membuka lapangan kerja serta semangat kreativitas masyarakat seperti area tambang.

KAJIAN PUSTAKA

Seiring dengan berjalannya perkembangan desa-desa di Indonesia, melihat fenomena masyarakat yang terjerat kemiskinan, diperlukan peningkatan kualitas masyarakat desa sehingga dapat berdaya guna dan mandiri. Pemberdayaan masyarakat diartikan sebagai taktik atau upaya pembangunan yang berpusat, yang menjadikan masyarakat sebagai subyek pembangunan. Pemberdayaan merupakan proses peningkatan kualitas masyarakat desa ke arah yang lebih baik sehingga dapat terwujud kemandirian.

Sumardjo (Endah, K. 2020) mengartikan Pemberdayaan masyarakat sebagai serangkaian proses pengembangan kesempatan yang dimiliki masyarakat, keinginan dan motivasi, serta kemampuan masyarakat untuk bisa mengakses

sumberdaya yang dimiliki, sehingga meningkatkan kemampuannya dalam menentukan masa depan sendiri dengan ikut berperan secara aktif dan terlibat langsung dalam mewujudkan dan mempengaruhi kualitas kehidupan diri sendiri dan komunitasnya.

Dalam Undang-Undang tentang Desa Nomor 6 Tahun 2014 butir 12 dikatakan bahwa Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Pemberdayaan yang dilakukan bisa dilakukan mulai dari perencanaan, kemudian pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.

Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) PT Vale Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) sebagai program kesediaan perusahaan dan sebagai wujud tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dalam suatu area lingkup aktivitas tambang PT Vale. Program PPM ini memiliki tiga bentuk skema program yaitu: PKPM, Kemitraan Strategis, dan Kontribusi Strategis. Adapun Visi PPM adalah: terwujudnya kemandirian dan kesejahteraan masyarakat melalui kemitraan dalam pengembangan kawasan perdesaan mandiri yang berkelanjutan.

Berdasarkan Visi PPM PT Vale, maka misi PPM sebagai berikut 1. Meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat melalui: penyiapan berkelanjutan pendidikan. 2. Meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat melalui: penyiapan keberlanjutan kesehatan dan layanan dasar. 3. Meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat melalui: penyiapan keberlanjutan dibidang ekonomi 4. Meningkatkan kemandirian masyarakat melalui penyiapan keberlanjutan pemeliharaan budaya dan kearifan lokal. 5. Meningkatkan kemandirian pengelolaan dan pelestarian lingkungan. 6. Meningkatkan kemandirian kelembagaan dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. 7.

Meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat melalui penyiapan keberlanjutan pengelolaan infrastruktur.

Secara khusus, tujuan PPM PT Vale, yaitu: 1. Terwujudnya visi dan misi PT Vale terkait pengelolaan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat ke dalam kebijakan, strategi, program, dan kegiatan; 2. Tersedianya suatu dokumen RI-PPM PT Vale 8 (Delapan) tahun yang bersifat indikatif dengan memuat kerangka umum pola dukungan perusahaan terhadap pembangunan wilayah pemberdayaan serta pilihan program dan kegiatan tahunan secara terintegrasi serta berkesinambungan dengan rencana pembangunan daerah; 3. Tersedianya panduan bagi Departemen Communications and External Affairs PT Vale dalam menyusun Rencana Kerja dan Biaya; 4. Tersedianya alat untuk melakukan evaluasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat; 5. Memudahkan seluruh unit kerja di lingkungan PT Vale, dalam mewujudkan visi-misi dan tujuan tersebut, dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur, 6. Meningkatnya efektifitas dan efisiensi alokasi pemanfaatan sumber daya dan pendanaan yang tersedia dalam mendukung program PPM di wilayah pemberdayaan PT Vale.

Program Pengembangan Kawasan Perdesaan Mandiri (PKPM) PKPM adalah program transformasi perubahan pola dengan skema pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dari PTPM. Sejak 2018, PKPM merupakan skema program yang lahir dari hasil berbagai diskusi, konsultasi dan kajian berbagai regulasi pembangunan desa, pembangunan antar desa dan pembangunan daerah dengan berbagai pihak yang terkait, dalam suatu kawasan ketika desa - desa tergabung untuk saling mengembangkan potensi terbaiknya, sehingga pertumbuhan ekonomi dapat lebih cepat terwujud, dan diharapkan berujung pada kemandirian masyarakat. Adapun skema dukungan perusahaan melalui Program PKPM untuk memfasilitasi pengembangan komoditi unggulan masyarakat berbasis kawasan perdesaan/lintas desa. Tujuan PKPM adalah peningkatan kapasitas produksi, nilai tambah masyarakat, daya saing

masyarakat dan kemandirian ekonomi di kawasan terdampak operasi. PKPM memberikan dana sebagai upaya peningkatan efektivitas bagi masyarakat untuk pengembangan kawasan dan produk unggulan desa ataupun produk unggulan kawasan yang dimiliki desa tersebut. Pelaksanaan PKPM selaras dengan berbagai aturan yang diterapkan, terutama terkait pelaksanaan program pengembangan masyarakat di lingkup perusahaan tambang, termasuk Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Permen Desa) No. 5 Tahun 2016 Tentang Pengembangan Kawasan Perdesaan.

Menurut Kartasasmita (Kusniawati, D Islami, N. P., Setyaningrum, B & Prasetyawati, E. 2017) mengatakan bahwa Pemberdayaan masyarakat adalah : (1) Menciptakan suasana/iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Titik tolak yang dimaksudkan merupakan pengenalan bahwa setiap manusia dan setiap masyarakat memiliki kemampuan yang dapat diberdayakan dan dikembangkan sesuai dengan kemampuannya, hal ini berarti bahwa tidak ada masyarakat yang tidak dapat diberdayakan, (2) Memperkuat potensi yang dimiliki masyarakat. Hal ini berarti bahwa membutuhkan langkah-langkah ke arah peningkatan, dengan cara menciptakan iklim dan suasana yang positif. Mewujudkan hal tersebut dapat dilakukan dengan upaya-upaya nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai sarana dan prasarana, serta pembukaan akses sehingga menjadikan masyarakat menjadi berdaya sebagai peluang yang dapat dimanfaatkan masyarakat. Oleh karenanya, diperlukan program khusus bagi masyarakat yang kurang berdaya, karena program umum yang berajalan selama ini belum dapat menjangkau sampai pada lapisan masyarakat ini, (3) Memberdayakan diartikan sama dengan melindungi. Pada prosesnya, pemberdayaan sebagai pencegahan yang lemah menjadi semakin lemah, dikarenakan kalah bersaing dengan yang lebih kuat. Oleh sebab itu, konsep dasar yang diterapkan dalam pemberdayaan masyarakat adalah perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah. Dengan Langkah tersebut diharapkan tujuan akhir yang dapat dicapai adalah fokus terhadap kemandirian masyarakat, peningkatan kemampuan,

dan menciptakan kemampuan untuk memajukan kualitas diri ke arah peningkatan taraf kehidupan yang lebih baik secara berkelanjutan.

Berdasarkan dengan Undang-Undang tentang Desa Nomor 6 Tahun 2014 pada butir 12, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan, dan Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 46/DPKP/SK/04/2018 terkait Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan, maka PT. Vale melakukan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagai bentuk perhatian terhadap masyarakat seputar kawasan tambang melalui penganggaran dana CSR untuk meningkatkan potensi diri berdasarkan potensi wilayah guna masyarakat area tambang semakin mandiri.

Kawasan pengembangan perdesaan yang terdapat di wilayah program PT Vale di 4 kecamatan di Luwu Timur sebagai berikut: Kawasan Pengembangan Wisata di Kecamatan Nuha Kawasan Pengembangan Wisata dengan tujuan melestarikan sumber daya alam yang dimiliki, adat-istiadat masyarakat, seni budaya, cagar budaya, dan diharapkan sebagai tren positif peningkatan kesejahteraan masyarakat. Program PKPM sebagai bentuk dukungan pengembangan wilayah pariwisata yang berbasis kepedulian terhadap keberlangsungan lingkungan, ekonomi, sosial dan budaya dengan tetap memposisikan masyarakat sebagai perencana, pemilik dan sekaligus pengelola

Salah satu komoditas unggulan di Kecamatan Wasuponda dan Nuha adalah sektor peternakan dan pengolahan non Kayu, program pengembangan kawasan Pengembangan Peternakan dan Pengolahan Non Kayu di Kec. Wasuponda dan Nuha diharapkan dapat mempercepat peningkatan produktivitas wilayah tersebut dan peningkatan perekonomian dengan memanfaatkan potensi komoditas unggulan pada sektor peternakan dan komoditas non kayu sehingga dapat berkontribusi pada pengembangan wilayah. Cara ini yang kita disebut wanaternakan (*Silvopasture*) adalah suatu

cara dengan mengkombinasikan antara kegiatan kehutanan dan peternakan dalam suatu kawasan hutan (luasan lahan).

Kecamatan Malili sebagai Kawasan Pengembangan Layanan Jasa dan Perkotaan, pengembangan layanan jasa dan perkotaan di wilayah tersebut ditujukan untuk dapat memberikan dampak positif terhadap sektor layanan jasa pada masyarakat perkotaan dan berkontribusi dalam peningkatan kemandirian ekonomi masyarakat. PKPM sebagai fasilitas dalam pengembangan layanan jasa dan perkotaan sebagai alternatif dalam meningkatkan mata pencarian masyarakat setempat, sebagai lahan pembukaan lapangan kerja baru sehingga dapat berkontribusi dalam peningkatan pendapatan masyarakat perkotaan melihat kondisi dan karakteristik masyarakat setempat.

Kawasan Pengembangan Potensi Perkebunan Lada di Kecamatan Towuti dengan tujuan dapat berkontribusi dalam peningkatan produksi dan pemasaran lada dengan dukungan sarana dan prasarana yang memadai salah satunya adalah tersedianya sistem informasi teknologi dan informasi pasar yang dapat menunjang mobilisasi pemasaran. Selain itu, PKPM saling bersinergi dengan Program Pengembangan lainnya dalam mengembangkan perkebunan lada yang berbasis ramah lingkungan dengan tujuan untuk peningkatan produktivitas wilayah dan ekonomi masyarakat pada sentra produksi perkebunan lada di kawasan tersebut.

METODE

Penelitian dilakukan di Kabupaten Luwu Timur meliputi Kecamatan Malili, Wasuponda, Towuti, dan Nuha dengan waktu penelitian Januari 2022. Pendekatan penelitian kuantitatif deskriptif dengan teknik *Non-probability Sampling*, pemilihan sampel dilakukan secara *Purposive Sampling* yaitu teknik penentuan sampel yang dilakukan berdasarkan dengan pertimbangan tertentu, terkait eksisting perkembangan kawasan (Sugiyono, 2012). Sampel yang diambil se-banyak 20 responden yang terdiri dari 20 responden di masing-masing kawasan pengembangan, dengan klasifikasi yang terdiri dari; Badan Kordinasi Antar

Desa (BKAD) Kawasan, Tim Koordinasi Kecamatan (TKK), Camat (atau sekretaris camat dan aparatur kecamatan), Kepala Desa (sekretaris desa serta aparatur desa), Anggota Badan Perwakilan Desa (BPD), Delegasi Desa, Pengurus BUMDes/BUMADes/ BUMDesMA yang merupakan komponen utama pelaku pengembangan kawasan bersama masyarakat di kawasan.

Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara berdasarkan pedoman kuesioner secara *fast to fast* analisis data pengukuran indeks perkembangan dan pemberdayaan masyarakat kawasan pendekatan 5 Aspek yakni : Pada dimensi ekonomi, dimensi sosial budaya, dimensi lingkungan, dimensi jejaring sarana dan prasarana dan dimensi kelembagaan. Analisis menggunakan *Multidimensional Scaling* (MDS) dengan menggunakan *software Rappfish Analysis*.

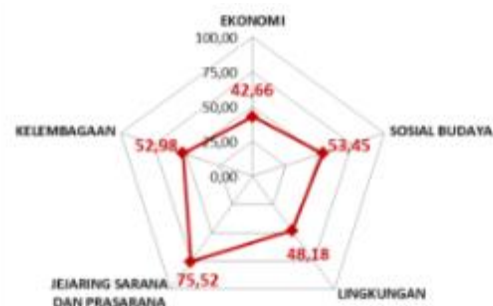
Penentuan nilai bobot masing-masing dimensi digunakan Pairwise Comparison Matrix, yang merupakan bagian dari Analisis Hierarchy Process (AHP) dengan menggunakan software Excel. Jika didapatkan nilai $CR > 0,1$, maka pengisian matriks atau kuesioner tidak konsisten, sehingga harus diulang dan jika didapatkan $CR \leq 0,1$, maka pengisian matriks/kuesioner konsisten, nilai bobot dapat digunakan. Untuk menghitung indeks komposit suatu kawasan pedesaan adalah: Indeks perkembangan dan pemberdayaan kawasan pedesaan = $\sum w_i D_i$ Dimana: w_i = Bobot masing-masing dimensi D_i = Nilai indeks masing-masing dimensi Status kawasan pedesaan dapat diketahui dari indeks perkembangan kawasan pedesaan tersebut, meliputi kategori berdaya saing $\geq 75-100$, kategori mandiri $\geq 50-\leq 75$, kategori konsolidasi $\geq 25-\leq 50$, dan kategori inisiasi $0-\leq 25$.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program pengembangan dan pemberdayaan kawasan pedesaan masyarakat PT. Vale melalui program PPM saat ini telah berjalan di Kabupaten Luwu Timur yang tersebar di Kecamatan Malili, Wasuponda, Towuti, dan Nuha meliputi 38 Kelurahan/Desa melalui anggaran CSR, sebagai tanggung jawab PT. Vale terhadap masyarakat yang hidup di area tambang. Berbagai bentuk program

dan bantuan telah diberikan sebagai upaya untuk meningkatkan kemandirian masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat dilihat dibawah.

Kawasan Pengembangan Wisata di Kecamatan Nuha. Pengembangan kawasan wisata sejauh ini telah dilakukan oleh pihak PT. Vale bersinergi dengan pemerintah daerah (Pemda) setempat dan masyarakat dalam mengembangkan pemberdayaan masyarakat yang berkorelasi dengan potensi wilayah maka untuk mengetahui kondisi pengembangan wisata tersebut berdasarkan pengukuran indeks kawasan perkembangan dan pemberdayaan masyarakat.



Gambar 36. Nilai Indeks Dimensi Perkembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Kawasan Wisata Nuha.
Sumber: Data, 2022

Berdasarkan hasil penghitungan nilai indeks setiap dimensi pada Kawasan Pengembangan Wisata, Kecamatan Nuha, yang meliputi 5 dimensi, yaitu; nilai indeks dimensi jejaring sarana dan prasarana sebesar 75,52; nilai indeks dimensi sosial budaya sebesar 53,45; nilai indeks dimensi kelembagaan sebesar 52,98; nilai indeks dimensi lingkungan sebesar 48,18; dan nilai indeks dimensi ekonomi sebesar 42,66.

Tabel 11. Nilai Indeks Kawasan Perkembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Kawasan Wisata Nuha

No.	DIMENSI	Indeks Dimensi	Bobot Dimensi	Indeks Komposit
1	EKONOMI	42,66	0,20	8,53
2	SOSIAL BUDAYA	53,45	0,20	10,69
3	LINGKUNGAN	48,18	0,20	9,64
4	JEJARING SARANA DAN PRASARANA	75,52	0,20	15,10
5	KELEMBAGAAN	52,98	0,20	10,60
I- PKP				54,56
STATUS KAWASAN				MANDIRI

Sumber, Data, 2022

Untuk penghitungan nilai indeks

perkembangan kawasan perdesaan diperoleh dari hasil perkalian antara nilai indeks dimensi dengan nilai bobot dimensi yang menghasilkan nilai indeks komposit dari masing-masing dimensi seperti pada Tabel 4 diatas, yaitu dimensi ekonomi sebesar 8,53; dimensi sosial budaya sebesar 10,69; dimensi lingkungan sebesar 9,64; dimensi jejaring sarana dan prasarana sebesar 15,10; dan kelembagaan sebesar 10,60. Berdasarkan jumlah nilai indeks komposit, maka diperoleh hasil Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan Kawasan Pengembangan Wisata, Kecamatan Nuha yaitu 54,56, dengan status kawasan Mandiri.

Data diatas menunjukkan bahwa kawasan wisata Kecamatan Nuha sejauh ini telah berjalan secara maksimal dengan kategori klaster mandiri. Kawasan ini memiliki luas 566,27 km² dengan populasi penduduk 22.708 jiwa, yang terdiri dari Desa Nuha memiliki luas 86 km² dengan populasi 595 jiwa, Desa memiliki luas Nikkel 96,02 km² dengan populasi 5.317 jiwa, Desa Sorowako memiliki luas 178 km² dengan populasi 9.906 jiwa, dan Kelurahan Magani memiliki luas 206,25 km² dengan populasi 6.890 jiwa. Potensi yang dimiliki Kawasan Pengembangan Wisata adalah Danau Matano dengan luas 16.408 Ha dan memiliki kedalaman ±589 meter merupakan danau terdalam se-Asia Tenggara yang menjadi objek wisata primadona bagi wisatawan lokal, domestik maupun mancanegara.

Dalam Pengembangan kawasan wisata yang dilakukan secara maksimal dan berkelanjutan akan melahirkan produktivitas masyarakat berupa: (1) Penduduk pedesaan berperan sebagai pelaku dalam pengembangan kawasan, warga desa menyediakan penginapan bagi turis dan wisatawan, menjual makanan dan minuman, membuka jasa laundry, angkutan, dan jasa-jasa yang lain yang dibutuhkan. (2) Tren positif kearah pemasaran produk lokal sektor pertanian, perkebunan, kerajinan tangan dan makanan khas misalnya sayur-sayuran, buah-buahan, kerajinan tangan, makanan khas tradisonal setempat, dan lain-lain, sehingga diharapkan dapat mendorong kelangsungan usaha masyarakat setempat yang berbasis kelokalan dan tradisi. (3) Pemberdayaan masyarakat setempat melalui kreativitas yang dimiliki misalnya sebagai

penyedia hiburan pertunjukan seni budaya, kerajinan tangan dan sebagainya, (4) Serta lebih meningkatkan kesadaran masyarakat akan nilai, budaya dan tradisi yang ada di lingkungan setempat dan budaya lokal yang masih dianut serta keunikan lingkungan alam yang dimiliki di kawasan tersebut.

Kawasan pengembangan peternakan serta pengolahan non kayu di dua Kecamatan yakni Wasuponda dan Nuha, PT. Vale telah bersinergi dengan pemerintah daerah bersama masyarakat untuk meningkatkan kawasan pengolahan non kayu, mengetahui kondisi pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kawasan tersebut ialah.



Gambar 37. Nilai Indeks Dimensi Perkembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Kawasan Pengembangan Peternakan dan Pengolahan Non Kayu di Kecamatan Wasuponda dan Nuha.

Sumber: Data, 2022

Berdasarkan hasil penghitungan nilai indeks setiap dimensi pada kawasan pengembangan peternakan dan pengolahan non kayu, di dua kecamatan yakni: Wasuponda dan Nuha, yang meliputi 5 dimensi, yaitu; dimensi jejaring sarana dan prasarana dengan nilai indeks sebesar 43,10; dimensi ekonomi didapatkan dengan indeks nilai sebesar 38,85; dimensi sosial budaya dengan indeks nilai sebesar 36,24; dimensi lingkungan dengan indeks nilai sebesar 30,64; dan dimensi kelembagaan dengan nilai indeks sebesar 23,22;.

Tabel 12. Nilai Indeks Kawasan Perkembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Kawasan Pengembangan Peternakan dan Pengolahan Non Kayu di Kecamatan Wasuponda dan Nuha.

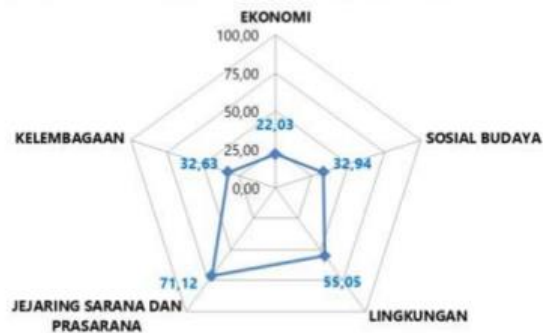
No.	DIMENSI	Indeks Dimensi	Bobot Dimensi	Indeks Komposit
1	EKONOMI	38,85	0,20	7,77
2	SOSIAL BUDAYA	36,24	0,20	7,25
3	LINGKUNGAN	30,64	0,20	6,13
4	JEJARING PRASARANA DAN SARANA	43,10	0,20	8,62
5	KELEMBAGAAN	23,22	0,20	4,64
I-PKP				34,41
STATUS KAWASAN				KONSOLIDASI

Sumber, Data, 2022

Untuk penghitungan nilai indeks perkembangan kawasan perdesaan diperoleh dari hasil perkalian antara nilai indeks dimensi dengan nilai bobot dimensi yang menghasilkan nilai indeks komposit dari masing-masing dimensi seperti pada Tabel 7 diatas, yaitu dimensi ekonomi sebesar 7,77; dimensi sosial budaya sebesar 7,25; dimensi lingkungan sebesar 6,13; dimensi jejaring sarana dan prasaranasebesar 8,62; dan dimensi kelembagaan sebesar 4,64. Berdasarkan jumlah nilai indeks komposit, maka diperoleh hasil Indeks perkembangan kawasan perdesaan kawasan pengembangan peternakan dan pengolahan non kayu pada dua kecamatan yakni: Wasuponda dan Nuha, yaitu 34,41, dengan status kawasan Konsolidasi.

Data diatas menunjukkan bahwa kawasan pengolahan non kayu belum berjalan efektif dengan kategori konsolidasi. Kawasan ini memiliki luas 707 km² dengan populasi penduduk sebanyak 7.828 jiwa di wilayah Kecamatan Wasuponda dan Nuha yang terdiri dari desadesa di Kecamatan Wasuponda yaitu; Desa Parumpanai memiliki luas 231 km² dengan populasi 3.955 jiwa, dan Desa Kawata memiliki luas 234 km² dengan populasi 2.037 jiwa, kemudian desa di Kecamatan Nuha yaitu; Desa Matano memiliki luas 242 km² dengan populasi 1.836 jiwa. Potensi yang dimiliki kawasan ini adalah areal persawahan seluas 584,58 ha. Luas persawahan di Desa Kawata seluas 94,75 Ha, di Desa parumpanai seluas 470,95 Ha, dan di Desa Matano seluas 18,88 Ha. Diketahui bahwa pengolahan non kayu keberhasilannya sangat bergantung terhadap dukungan dari masyarakat, yang dimana masyarakat menganggap bahwa pengolahan non kayu merupakan hal yang mesti dilestarikan dan tidak dapat dijadikan sebagai komersialisasi karena ini sangat bergantung bagi kehidupan mereka (Permatasari, D. A 2015).

Pada kawasan pengembangan layanan jasa dan perkotaan pada Kecamatan Malili. PT. Vale telah bersinergi dengan pemerintah daerah bersama masyarakat untuk meningkatkan kawasan layanan Jasa dan Perkotaan, mengetahui kondisi pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kawasan tersebut ialah.



Gambar 38. Nilai Indeks Dimensi Perkembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Kawasan Pengembangan Layanan Jasa dan Perkotaan di Kecamatan Malili.
Sumber, Data, 2022

Berdasarkan hasil penghitungan nilai indeks setiap dimensi pada Kawasan Pengembangan Layanan Jasa dan Perkotaan, Kecamatan Malili, yang meliputi 5 dimensi, yaitu; dimensi jejaring sarana dan prasaranadengan nilai indeks sebesar 71,12; dimensi lingkungan dengan nilai indeks sebesar 55,05; dimensi sosial budaya dengan nilai indeks sebesar 32,94; dimensi kelembagaan nilai indeks yakni 32,63; dan dimensi ekonomi dengan nilai indeks sebesar 22,03.

Tabel 13. Nilai Indeks Kawasan Perkembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Kawasan Pengembangan Layanan Jasa dan Perkotaan di Kecamatan Malili.

No.	DIMENSI	Indeks Dimensi	Bobot Dimensi	Indeks Komposit
1	EKONOMI	22,03	0,20	4,41
2	SOSIAL BUDAYA	32,94	0,20	6,59
3	LINGKUNGAN	55,05	0,20	11,01
4	JEJARING PRASARANA DAN SARANA	71,12	0,20	14,22
5	KELEMBAGAAN	32,63	0,20	6,53
I-PKP				42,75
STATUS KAWASAN				KONSOLIDASI

Sumber, Data, 2022

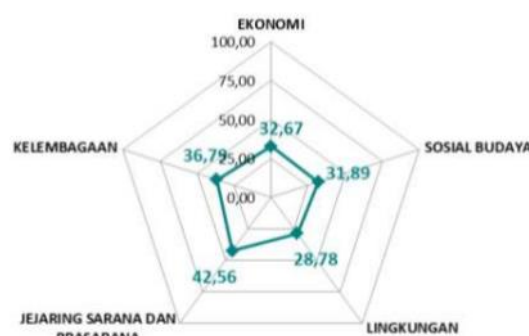
Untuk penghitungan nilai indeks perkembangan kawasan perdesaan diperoleh dari hasil perkalian antara nilai indeks dimensi dengan nilai bobot dimensi yang menghasilkan nilai indeks komposit dari masing-masing dimensi seperti pada Tabel 11 diatas, yaitu dimensi ekonomi sebesar 4,41; dimensi sosial budaya sebesar 6,59; dimensi lingkungan sebesar 11,01; dimensi jejaring sarana dan prasaranasebesar 14,22; dan dimensi kelembagaan sebesar 6,53. Berdasarkan jumlah nilai indeks komposit, maka diperoleh hasil Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan Kawasan Pengembangan Layanan Jasa dan Perkotaan,

Kecamatan Malili, yaitu 42,75, dengan status kawasan Konsolidasi.

Kawasan ini memiliki luas 32 km² dengan populasi penduduk sebanyak 13.585 jiwa di wilayah Kecamatan Malili yang terdiri dari Desa Puncak Indah luas 12,26 km² dengan populasi 5.902 jiwa, Kelurahan Malili memiliki luas 12,16 km² dengan populasi 4.304 jiwa, dan Desa Baruga memiliki luas 7,20 km² dengan populasi 3.379 jiwa. Potensi yang dimiliki kawasan ini adalah Kelurahan Malili merupakan wilayah yang terintegrasi dengan ibukota kecamatan dan ibukota kabupaten dan wilayah lainnya merupakan pusat perkantoran pemerintahan yaitu Desa Puncak Indah.

Data diatas menunjukkan bahwa kawasan layanan jasa perkotaan Kecamatan Malili belum berjalan efektif karena masih di status konsolidasi disebabkan pola jejaring dan kelembagaan antar pelaku jasa dari tingkat daerah ke provinsi maupun pusat belum maksimal, senada dalam penelitian (Hiryanto, H. 2017). Hubungan jaringan yang terbangun satu sama lain antara pelaku layanan jasa menghasilkan persepsi yang tidak memberikan adanya perbedaan keragaman hubungan dengan pihak lain yang terkait. Peranan sumber daya yang diamati lebih banyak dilakukan dengan pihak yang memiliki kepentingan yang sama atau kebutuhan yang terkait dalam perkembangan layanan jasa perkotaan

Kawasan Pengembangan Potensi Perkebunan Lada di Kecamatan Towuti. PT. Vale telah bersinergi dengan pemerintah daerah bersama masyarakat untuk meningkatkan kawasan Potensi Perkebunan Lada mengetahui kondisi pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kawasan tersebut ialah.



Gambar 39. Nilai Indeks Dimensi Perkembangan dan Pemberdayaan Kawasan Pengembangan Potensi Perkebunan Lada di Kecamatan Towuti
Sumber, Data, 2022

Berdasarkan hasil penghitungan nilai indeks dimensi yang meliputi 5 dimensi pada Kawasan Pengembangan Potensi Perkebunan Lada dan Industri, Kecamatan Towuti, yaitu; dimensi jejaring sarana dan prasarana dengan nilai indeks sebesar 42,56; dimensi kelembagaan dengan nilai indeks sebesar 36,79; dimensi ekonomi dengan nilai indeks sebesar 32,67; dimensi sosial budaya dengan nilai indeks sebesar 31,89; dan dimensi lingkungan dengan nilai indeks sebesar 28,89.

Tabel 14. Nilai Indeks Kawasan Perkembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Kawasan Pengembangan Potensi Perkebunan Lada di Kecamatan Towuti.

No.	DIMENSI	Indeks Dimensi	Bobot Dimensi	Indeks Komposit
1	EKONOMI	32,67	0,20	6,53
2	SOSIAL BUDAYA	31,89	0,20	6,38
3	LINGKUNGAN	28,78	0,20	5,76
4	JEJARING SARANA DAN PRASARANA	42,56	0,20	8,51
5	KELEMBAGAAN	36,79	0,20	7,36
I-PKP				34,54
STATUS KAWASAN				KONSOLIDASI

Sumber, Data, 2022

Untuk penghitungan nilai indeks perkembangan kawasan perdesaan diperoleh dari hasil perkalian antara nilai indeks dimensi dengan nilai bobot dimensi yang menghasilkan nilai indeks komposit dari masing-masing dimensi seperti pada Tabel 17 diatas, yaitu dimensi ekonomi sebesar 6,53; dimensi sosial budaya sebesar 6,38; dimensi lingkungan sebesar 5,76; dimensi jejaring sarana dan prasarana sebesar 8,51; dan dimensi kelembagaan sebesar 7,36. Berdasarkan jumlah nilai indeks komposit, maka diperoleh hasil Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan Kawasan Pengembangan Potensi Perkebunan Lada, Kecamatan Towuti, yaitu 34,54, dengan status kawasan konsolidasi

Kawasan ini memiliki luas 440 km² dengan populasi 6.973 jiwa di wilayah Kecamatan Towuti yang terdiri dari Desa Tokalimbo memiliki luas 54,65 km² dengan populasi 1.011 Jiwa, Desa Loeha memiliki luas 297,39 km² dengan populasi 1.169 Jiwa, Desa Ranteangin memiliki luas 48,42 km² dengan populasi 1.967 Jiwa, Desa Bantilang memiliki luas 5,18 km² dengan populasi 2.003 Jiwa, dan Desa Masiku memiliki luas 34,57 km² dengan populasi 823 Jiwa. Potensi yang dimiliki kawasan ini adalah hampir 20 ribu ton pertahun produksi lada Luwu Timur sebagiannya dikontribusi dari kawasan ini.

Data diatas menunjukkan bahwa Potensi Perkebunan Lada dan Industri, Kecamatan Towuti belum berjalan efektif karena masih di status konsolidasi, pola petani terkait pengembangan lada/merica masih sifat tradisional sehingga produksi makin lambat, kecenderungan petani selama ini masih menjalankan pola pertanian yang konvensional berakibat pada produksi lada cenderung belum maksimal. Pada implementasinya, program ini juga

mengindikasikan bahwa adanya peningkatan kapasitas petani tentang cara budidaya lada yang baik. Diharapkan bahwa pihak perusahaan dan pemerintah dapat bersinergi dengan baik dalam pengembangan kawasan di Kabupaten Luwu Timur kedepannya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, maka penelitian terkait Indeks Perkembangan Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan Kabupaten Luwu Timur, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kawasan Pengembangan Wisata, Kecamatan Nuha memiliki nilai Indeks Perkembangan dan pemberdayaan Kawasan Perdesaan yaitu 54,56 dengan status mandiri.
2. Kawasan Pengembangan Peternakan dan Pengolahan Non Kayu, Kecamatan Wasuponda dan Nuha, memiliki nilai Indeks Perkembangan dan pemberdayaan kawasan perdesaan yaitu 34,41 dengan status konsolidasi.
3. Kawasan pengembangan layanan jasa dan perkotaan, kecamatan malili, memiliki nilai indeks perkembangan kawasan perdesaan yaitu 42,75 dengan status keberlanjutan kawasan adalah konsolidasi.
4. Kawasan pengembangan potensi perkebunan lada, kecamatan towuti, memiliki nilai indeks perkembangan kawasan perdesaan (ipkp) yaitu 34,54 dengan status konsolidasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahtera, N. I., Atmaja, E. J. J., & Hayati, L. 2021. Peningkatan Kapasitas Petani Lada dalam Penerapan Praktik Pertanian yang Baik. *E-Dimas: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 12(2), 376-381.
- Disemadi, H. S., & Prananingtyas, P. 2020. Kebijakan Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai Strategi Hukum dalam Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 4(1), 1-16.
- Endah, K. 2020. Pemberdayaan Masyarakat: Menggali Potensi Lokal Desa. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6(1), 135-143.

- Gumanti, S., Juniah, R., & Taqwa, R. 2016. Kajian Implementasi Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Pertambangan (Corporate Social Responsibility) Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Dan Lingkungan. *Jurnal Empirika*, 1(2), 111-126.
- Hiryanto, H. 2017. Dampak ekonomi dan sosial wisata alam berbasis masyarakat dalam kota konteks pemberdayaan masyarakat: studi kasus pada desa wisata Bejiharjo, Karangmojo, Gunung Kidul. *Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan*, 10(2), 149-160.
- Kusniawati, D., Islami, N. P., Setyaningrum, B., & Prasetyawati, E. 2017. Pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal melalui program desa wisata di Desa Bumiaji. *Sosioglobal: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi*, 2(1), 59-72.
- Pantiyasa, I. W. (2014). Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat (Community Based Tourism) Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Di Desa Bedulu, Blah Batuh, Gianyar). *Jurnal Ilmiah Hospitality Management*, 1(2).
- Permatasari, D. A (2015). *Strategi Peningkatan Partisipasi Masyarakat Pemanfaat Hasil Hutan Non Kayu (Hhnc) Di Taman Nasional Baluran Kabupaten Situbondo*. Diterbitkan Jember, Fakultas Pertanian, Universitas Jember.
- Pranoto, A. R., & Yusuf, D. 2014. Program CSR Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Menuju Kemandirian Ekonomi Pasca Tambang di Desa Sarijaya. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 18(1), 39-50.
- Puspita, M., & Ibrahim, M. 2021. Pemberdayaan Masyarakat Lingkar Tambang Melalui Umkm Ekonomi Kreatif Di Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Pertambangan*, 5(2), 68-77.
- Saleh, A., & Basit, L. 2018. Pengembangan Model Corporate Social Responsibility (CSR) Perusahaan Tambang Emas Agincourt Resources Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Tapanuli Selatan Sumatera Utara. *Kumpulan Penelitian Dan Pengabdian Dosen*, 1(1).
- Suhadi, A., Febrian, A. R., & Turatmiyah, S. (2014). Model Corporate Social Responsibility (CSR) Perusahaan Tambang Batubara di Kabupaten Lahat Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kearifan Lokal. *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(1), 72-82.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methode)*. Bandung, Alfabeta